

JURNAL PERTANAHAN

Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Melalui Penerapan Sistem Pendaftaran Tanah
Publikasi Positif Di Indonesia
Ing Sodikin-Ahli

Pendaftaran Tanah Dengan Sistem Negatif Bertandem Positif
Elana Afri Gondowarno

Telaahan Kritis Sistem Pendaftaran Tanah Positif Antara Peluang Dan Tantangan
Rizki Anwar

Memudarnya Partisipasi Lokal Vs. Menguatnya Peran Kelompok ERI Dalam Ruang Kebijakan Negara
Program PRAN Jaringga
Heri Perwandi

Krisis Pelugas Ulur Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah
Elana Gondowarno

Peran Kepala Desa/Lurah Dalam Pendaftaran Tanah
Wahid



DITERBITKAN OLEH :
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI

JURNAL PERTANAHAN

ISSN 0853-1676

Vol. 4

No. 1

Mei 2014

Penanggung Jawab

Drs. Suhaily Syam, M.M

Redaktur

Ir. Iwan Taruna Isa, MURP

Ir. Eliana Sidipurwanti, M.Si

Mitra Bestari

Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, MA
Pakar Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor

Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto, M.Sc
Pakar Ilmu Tanah Institut Pertanian Bogor

Dr. Satyawan Sunito
Pakar Agraria Institut Pertanian Bogor

Noer Fauzi Rachman
Pemerhati Agraria

Penyunting Pelaksana

Dr. Aslan Noor, SH.,MH.,SPI
Pakar Ilmu Hukum Tata Negara

Gatot Teja Pratama, A.Ptnh., M.M
Manajemen Pertanahan

Indriyati, S.SiT
Peneliti Bidang Pertanahan

Arif Ramasiwi G.P., SH
Hukum di Bidang Pertanahan

Desain Grafis & Fotografer

Riska Aidina Pristiria, S.T

Shofiatul Munawaroh, S.Kom

Sekretariat

Munsyarif, A.Ptnh., M.Si

Supriyadi, S.Sos

Yudha Purbawa, S.P

Melia Yusri, S.P

Romi Nugroho, S.Si

Pusat Penelitian dan Pengembangan
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Jl. A. Agus Salim No.58 Jakarta Pusat

Telp./Fax. (021) 3909016, www.bpn.go.id

e-mail : pustubang@bpn.go.id

Frekuensi terbit dua kali setahun, setiap bulan i dan No

PENGANTAR REDAKSI

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, sehingga Jurnal Pertanahan Volume 4 Nomor 1 Tahun 2014 dapat diterbitkan. Jurnal Pertanahan ini berisi telaahan yang berhubungan dengan pendaftaran tanah. Telaahan tersebut meliputi sistem pendaftaran tanah, perlindungan hukum pemegang hak atas tanah, program pendaftaran tanah, petugas ukur, dan peran Kepala Desa/Lurah dalam pendaftaran tanah. Telaahan-telaahan tersebut disajikan oleh penulis-penulis sebagai berikut:

Iling R. Sukidin Arifin menulis artikel mengenai Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Melalui Penerapan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif di Indonesia, memaparkan bahwa akibat sistem pendaftaran tanah di Indonesia saat ini menimbulkan permasalahan di bidang hukum. Banyak pemegang hak atas tanah yang kalah saat digugat di Lembaga Peradilan, baik Pengadilan Umum maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, karena kesaksian ahli maupun alat bukti yang ada di warkah Badan Pertanahan Nasional (BPN) diabaikan.

Liliana Arif Gondoutomo menulis artikel mengenai Pendaftaran Tanah dengan Sistem Negatif Bertendensi Positif, memaparkan sistem publikasi dalam pendaftaran tanah baik sistem pendaftaran tanah negatif maupun sistem pendaftaran tanah positif yang berbeda dalam praktek dan konsekuensi hukumnya. Sistem pendaftaran tanah di Indonesia adalah sistem negatif dengan kecenderungan positif, sehingga menghasilkan sertifikat tanda bukti hak, tetapi bisa dituntut oleh pihak yang memiliki dasar hukum yang kuat.

Rizal Anshari menulis artikel mengenai Telaahan Kritis Sistem Pendaftaran Tanah Positif antara Tantangan dan Peluang, memaparkan mengenai sistem pendaftaran tanah baik sistem pendaftaran tanah negatif maupun sistem pendaftaran tanah positif. Kualitas pendaftaran tanah tidak tergantung kepada sistem yang dianut, akan tetapi hasil pendaftaran tanah yang dapat menjamin kepastian hukumlah yang diharapkan. Untuk mencapai kepastian hukum tentang subjek hak dan obyek hak atas tanah, yang dilakukan bukan merubah sistem pendaftaran tanah, tetapi melaksanakan pendaftaran tanah sesuai peraturan.

Haru Purwardani menulis artikel mengenai Memudarnya Partisipasi Lokal Vs Menguatnya Peran Kelompok Elite Dalam Ruang Kebijakan Negara: Program PPAN Jasinga, memaparkan mengenai PPAN di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat yang secara fundamental memiliki makna strategis dalam mewujudkan secara konsisten pasal 33 UUD 1945. Komitmen awal pemerintah yang baik dalam melaksanakan PPAN diharapkan berlanjut.

Eliana Sidiqunwanti menulis artikel mengenai Krisis Petugas Ukur dalam Percepatan Pendaftaran Tanah memaparkan mengenai petugas ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota saat ini masih kurang jumlahnya dibandingkan beban kerjanya. Namun penambahan petugas ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tidak setiap tahun ada, walaupun ada penambahan tidak sesuai dengan kebutuhan. Di sisi lain terjadi pengurangan petugas ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota akibat memasuki usia masa purna bakti (pensiun).

Waskito menulis artikel mengenai Peran Kepala Desa/Lurah dalam Pensiortipikatan Tanah memaparkan mengenai peran-peran apa saja yang dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah dalam rangka pensiortipikatan bidang-bidang tanah di wilayahnya. Peran Kepala Desa/Lurah tersebut cukup penting, namun masih banyak Kepala Desa/Lurah yang belum mengetahuinya dengan baik.

Demikian garis besar enam artikel yang mengisi Jurnal Pertanahan Volume 4 Nomor 1 Tahun 2014. Saran dan kritik yang membangun untuk pengembangan jurnal ini lebih lanjut sangatlah diharapkan. Terima kasih atas kerja sama Tim dan penulis pada Jurnal Pertanahan ini, semoga dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menaibah wawasan mengenai pertanahan.

Redaksi

DAFTAR ISI

1. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Melalui Penerapan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif Di Indonesia 1 - 28
Iling Sodikin Arifin
2. Pendaftaran Tanah Dengan Sistem Negatif Bertendens Positif 29 - 44
Liliana Arif Gondoutomo
3. Telaahan Kritis Sistem Pendaftaran Tanah Positif Antara Peluang Dan Tantangan..... 45 - 54
Rizal Anshari
4. Memudarnya Partisipasi Lokal Vs Menguatnya Peran Kelompok Elit Dalam Ruang Kebijakan Negara: Program PPAN Jasinga..... 55 - 78
Heru Purwandari
5. Krisis Petugas Ukur Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah 79 - 102
Eliana Sidipurwanti
6. Peran Kepala Desa / Lurah Dalam Pensertipikat Tanah 103 - 120
Waskito

Ilham Susanto Ardi (Pertanahan, Jakarta)

PENLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH MELALUI PENERAPAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH PUBLIKASI POSITIF DI INDONESIA

Jurnal Pertanahan, Volume 4, Nomor 1, Mei 2014, Halaman : 1 - 28

ABSTRAK

Penerapan publikasi positif melalui pendaftaran tanah di Indonesia menimbulkan permasalahan di bidang hukum pertanahan. Banyak pemegang hak secara mempunyai sertipikat hak atas tanah, hak sertipikat hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan hak guna pakai yang sudah berlangsung lebih dari 10 tahun sejak sertipikat itu diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang dikaitkan di belakang peradilan hak peradilan umum maupun peradilan Tata Usaha Negara. Setelah ada bukti yang baik dalam dan waktu beracara di peradilan hakim menjatuhkan kesaksian dan menguraikan bukti yang ada di waktu Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berlaku pemegang hak secara mempunyai sertipikat hak atas tanah Badan Pertanahan Nasional, pemegang hak tidak ada pertanggung jawaban pemegang hak secara mempunyai hak pertanahan berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 memiliki kesaksi. Sedangkan sertipikat yang diterbitkan lebih mempunyai sertipikat lebih dari 5 tahun dan memperolehnya dengan baik hak atas tanah dapat diperoleh di belakang peradilan. Hakim tidak menerapkan konsep tersebut berbentuk peraturan perundang-undangan. Sedangkan sertipikat yang diterbitkan dalam perundang-undangan yang mengikat para hakim, tidak di peroleh sertipikat secara mempunyai hak dalam bentuk ganti rugi, apabila proses penerbitan sertipikat oleh pemegang hak yang sebenarnya akan mendapat ganti rugi. Sistem publikasi saat ini perlu pertanahan perlu dikaitkan dengan sistem publikasi positif untuk menjamin kepastian hukum pemegang hak atas tanah dan oleh pemerintah. Ada aspek pertanahan, karena tujuan hukum salah satunya adalah kepastian hukum.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Pemegang Hak Atas Tanah, Sistem Publikasi

Libana Ari Gunturono (Asosiasi Notaris Indonesia, Jakarta)

PENDAFTARAN TANAH DENGAN SISTEM NEGATIF BERTENDENS POSITIF

Jurnal Pertanahan, Volume 4, Nomor 1, Mei 2014, Halaman : 29 - 44

ABSTRAK

Pendaftaran tanah secara umum bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepemilikan tanah. Namun pendaftaran tanah dipengaruhi pertumbuhan penduduk, kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan kepentingan lainnya. Untuk memperoleh tujuan tersebut dilakukan dengan prinsip publikasi, setiap orang dapat memperoleh sertifikat hak atas tanah dan secara terdapat hukum atas tanah. Ada dua sistem publikasi, sistem positif dan negatif yang berbeda dalam praktik dan konsep hukumnya. Pada sistem positif ada yang tercantum pada subyek dan subyek objek tanah tersebut. Ada subyek yang sudah terdaftar sebagai yang berhak atas tanah tersebut, tidak bisa digugat, termasuk hak bidang tanah yang telah diukur sebagai batas kadaster. Sertifikat sebagai bukti hak atas tanah adalah hak yang sudah terdaftar. Negara menjamin penuh bagi pemegang hak atas tanah terhadap gugatan, termasuk permohonan jika ada kesalahan dalam prosedur. Dalam sistem negatif, pemilik yang terdaftar tidak dianggap memiliki hak atas lapangan dan yang lain yang mengklaim sebagai pemilik yang sebenarnya. Sistem pendaftaran tanah menurut Undang-Undang Pasal 12 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA serta PP No. 24/1997 adalah sistem negatif dengan kepastian negatif positif. Menghasilkan sertipikat tanda bukti hak yang kuat, tetapi bisa dituntut oleh pihak lain yang memiliki data hukum yang kuat di pengadilan. Kondisi tanah di Indonesia, yang meliputi luas pertanahan dan luas bidang tanah yang telah diukur sebagai batas kadaster. Menyebabkan data fisik dan data yuridis pendaftaran tanah yang tidak akurat. Namun, bidang tanah yang terdaftar dengan publikasi negatif secara bertahap dapat dikaitkan ke sistem positif dengan berbagai cara, seperti (a) akurasi pengukuran bidang tanah oleh petugas, (b) meningkatkan kapasitas dan efisiensi dalam membuat akta peralihan tanah oleh PPAT (c) penerbitan hak yang memperhatikan sertipikat pendaftaran tanah. Upaya ini akan lebih diperkuat dengan investigasi kepastian dan ahli pertanahan dan dikembangkan asuransi pendaftaran tanah.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Sistem Positif, Sistem Negatif Bertendens Positif

Rizki Anshari (Pertanahan Agraria, Jakarta)

TELAAH KRITIS SISTEM PENDAFTARAN TANAH POSITIF ANTARA PELUANG DAN TANTANGAN

Jurnal Pertanahan, Volume 4, Nomor 1, Mei 2014, Halaman : 43 - 54

ABSTRAK

Pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan untuk menjamin kepastian hukum mengenai hak atas tanah, batas-batas bidang tanahnya serta pemegang hak atas dan bidang tanah. Penyelenggaraan pendaftaran tanah tersebut meliputi pengukuran, dokumentasi dan pendaftaran tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, dan pemberian sertifikat tanah bukti hak yang berlaku sebagai perbuktian yang kuat.

Sistem pendaftaran tanah di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai perbuktian yang kuat berdasarkan di bahwa sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem negatif. Untuk itu akan dilakukan apakah sistem pendaftaran tanah di Indonesia tetap menganut sistem negatif atau

akan diubah menjadi sistem positif

Kata kunci : Pendaftaran Tanah, Sistem Positif, Sistem Negatif

Haru Purwandari (Institut Pertanian Bogor, Bogor)
**MEMUDARNYA PARTISIPASI LOKAL VS MENGUATNYA PERAN KELOMPOK ELIT DALAM RUANG KEBIJAKAN
NĒARA: PROGRAM PPN JASINGA**

Jurnal Pertanahan, Volume 4, Nomor 1, Mei 2014, Halaman : 53 - 78

ABSTRAK

Program Pendaftaran Agraria Nasional (PPAN) adalah ruang negara dalam memberi akses warga miskin terhadap sumber-sumber pergiliran lokal. Permasalahan klasik yang seringkali muncul dalam pelaksanaan PPN menyangkut proses redistribusi tanah berbasis prosedur kelompok penerima dan jumlah lahan yang diterima. Persoalan makin memuncak ketika disipasi bahwa akses pekarja redistribusi yang tidak dibagikan dari pendasi yang kokoh bermula pada kebernyan diungkap PPN terhadap kesejahteraan Komunitas. Situasi ini diungkap ketika awatan bukan kelompok yang tidak maka hasil dari redistribusi hanya akan menjadi soal ekowasi semula dan dengan tidak dapat berpindah bagian. Pemasaran sebagai dasar pemenuhan PPN dengan lahan lahan yang tidak dapat di antara 9 desa lain di Kecamatan Jasinga menunjukkan jumlah ke arah masyarakat kelompok agraria baru yang tidak ideal yang cenderung mengarah pada pemertanian kepemilikan lahan. Untuk memulainya ulang, distribusi tanah merupakan kenakwaan dari ketidadaan relung lahan untuk memastikan distribusi dipegang keadilan. Proses nasional yang semestinya dapat dilakukan di awal proses gagal dilakukan. Mempertanyakan akses kepada kelompok penerima menjadi persoalan sulit dan berat potensi konflik sebagai akses akses partisipasi lokal.

Kata kunci : PPN, Redistribusi Tanah, Pemertanian Kepemilikan Tanah, Partisipasi Lokal

Elhana Bidipurwanti (Pusat Penelitian dan Pengembangan BPN RI, Jakarta)
KRISIS PETUGAS UKUR DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH

Jurnal Pertanahan, Volume 4, Nomor 1, Mei 2014, Halaman : 79 - 102

ABSTRAK

Pendaftaran tanah merupakan kewajiban Pemerintah dalam menjamin kepastian hukum atas tanah. Proses pendaftaran tanah membutuhkan Petugas Ukur untuk melaksanakan pengukuran bidang bidang tanah. Jumlah Petugas Ukur di Kantor Pendaftaran Kabupaten/Kota sampai pada umumnya hanya dua sampai dengan tiga orang, sehingga perlu penambahan tiga orang Petugas Ukur. Penambahan Petugas Ukur belum tentu ada solusi lain, walaupun ada jumlahnya tidak memadai atau tidak sesuai kebutuhan karena hanya satu orang kurangnya Petugas Ukur menyebabkan besar kapasitas menjadi lebih besar daripada sebenarnya. Akibatnya pelaksanaan pengukuran bidang tanah menjadi terhambat. Di sisi lain, sarana dan prasarana pengukuran yang diharapkan dapat mendukung Petugas Ukur dalam bekerja, ternyata masih terbatas jumlahnya dan sebagian sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Upaya untuk mengatasi kekurangan Petugas Ukur di Kantor Pendaftaran Kabupaten/Kota telah dilakukan dengan berbagai cara, agar beban pengukuran bidang tanah dapat dilalui dengan baik. Namun, penambahan Petugas Ukur sampai dengan jumlah yang memadai sesuai dengan kebutuhan merupakan suatu kebaruan, agar percepatan pendaftaran tanah dapat tercapai.

Kata kunci : Pendaftaran Tanah, Petugas Ukur, Percepatan Pendaftaran Tanah

Waskito (Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPN RI, Jakarta)
PERAN KEPALA DESA / LURAH DALAM PENSERTIPIKAT TANAH

Jurnal Pertanahan, Volume 4, Nomor 1, Mei 2014, Halaman : 103 - 120

ABSTRAK

Kepala Desa / Lurah memiliki peran dalam pendaftaran tanah bagi masyarakat di pedesaan / desa yang dipimpinnya. Peran Kepala Desa / Lurah tersebut adalah: 1) untuk mengingatkan masyarakat untuk memaang tanda batas tanah mereka; 2) untuk menghadiri proses pengukuran; 3) untuk mengingatkan masyarakat untuk menjaga keamanan kebawahan dasar dari kadaster nasional; 4) Kepala Desa / Lurah sebagai anggota Komite pemertanian tanah (panitia A) dan juga dalam pengurusan paket dan keberatan. Namun, masih banyak Kepala Desa / Lurah tidak tahu peran mereka dalam pendaftaran tanah sehingga upaya yang diperlukan harus diambil untuk memberitahu mereka.

Kata kunci : Kepala Desa, Peran dalam pendaftaran tanah

ling Sodikin Arifin (Pertamina, Jakarta)

LEGAL PROTECTION FOR HOLDERS OF LAND RIGHTS THROUGH POSITIVE PUBLICITY OF INDONESIAN LAND REGISTRATION SYSTEM

Journal Pertanahan, Volume 4, No. 1, May 2014, Page : 1 - 28

ABSTRACT

Publication issues in Indonesian land registration system causes problems in land law. Many of land title holders, such as right of ownership, right to use building, right of use and right of management which has published more than 10 years by the National Land Agency but lost in court, both general courts and administrative courts. The defeat even with the evidence that was not true and when the hearing judge ignored expert testimony or evidence in the national land agency's workah. With the court ruling has in cracht, the winner submits for cancellation right to National Land Agency and land title holder has no protection even though the land law system based on Article 32 paragraph (1) on Regulation No. 24 of 1997 has rechtsverweking concept. The concept stated that someone has land title more than 5 years and has it with a good intention can not be sued in the courts. The judge did not apply that concept because only in government regulations, so it is needed to be improve the rechtsverweking concept regulated in the constitution that will bind the judges. For that, I should also be prepared protection insurance agencies in the form of compensation, if the process of issuing a certificate for their lands has procedure disability so the land title holder get compensation. This current publication system needs to be upgraded into a system of positive publicity to ensure legal certainty to the land title holders and the investors, because one purpose of the law is legal certainty.

Keywords : legal protection, land title holder, land publication system

Liliana Arif Gondoutomo (Indonesian Notary Association, Jakarta)

LAND REGISTRATION SYSTEM WITH POSITIVE NEGATIVE TENDENTIOUS

Journal Pertanahan, Volume 4, No. 1, May 2014, Page : 29 - 44

ABSTRACT

Land registration generally aims to provide legal certainty and legal protection of land ownership. Concept of the land registration influenced of population growth, socio-economic conditions of society and the advancement of technology. To realize that goal done publicity with principle, every person can know all of the rights to the land and all legal actions regarding the land. There are two systems of publicity, positive and negative system, are different in practices and legal consequences. Positive system is that what is listed subjects and its object is guaranteed truth. If a person already registered as entitled to the land, it can not be claim, including the border of parcel that have been measured as cadastral boundaries. Certificate is proof of land rights are absolute rights after registration. State give full guarantee for holders of registered land rights against any claiming, including compensation if there is a error in procedure. In the negative system, the registered owner is not an absolute guarantee if there is a lawsuit from others claiming as the actual owner. The national land registration in accordance with Article 19 paragraph (2) letter c, Article 23 paragraph (2), Article 32 paragraph (2) and Article 38 paragraph (2) BAL and PP 24/1997 is negative with a tendency to positive system. Produce letters evidence applicable rights as a strong evidence, but can be sued by other parties that have strong legal grounds by courts. Land conditions in Indonesia, which mostly come from undocumented customary rights cause physical data and juridical data for preliminary land registration is not guaranteed accurate. However, the process of land parcels that are listed with negative publicity gradually can be increased to a positive system with various ways, such as (a) accuracy measurements of land parcel by land surveyors (b) increasing the capacity and dedication in making a land transfer deed by PPAT (c) decision the judge who won the certificate of land registration. The effort will be more reinforced with the investigation of truth by an expert certificate and insurance developed land registration.

Keywords : Land registration, Positive System, Negative with Tendency to Positive System

Rizal Anshari (Agrarian Observer, Jakarta)

CRITICAL REVIEW OF POSITIVE LAND REGISTRATION SYSTEM, BETWEEN OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

Journal Pertanahan, Volume 4, No. 1, May 2014, Page : 45 - 54

ABSTRACT

Land registration Indonesia aims to ensure legal certainty of land rights, land parcel boundary and land rights holders. It consists of measuring land, mapping, and land bookkeeping of land, registration of land rights, also giving certificate of land titles as a strong evidence. Land registration in Indonesia is a negative system. This article will discuss whether

Indonesia still in a negative system or going to be a positive system.

Keywords : Land registration, Positive System, Negative System

Heru Purwandi (Bogor Agricultural Institute, Jakarta)
**STRENGTHENING LOCAL PARTICIPATION VS. WANING ROLE OF THE ELITE GROUP IN THE STATE SPACE
POLICY: PROGRAM PPAH JASINGAT**

Journal Pertanahan, Volume 4, No. 1, May 2014, Page : 55 - 76

ABSTRACT

Keywords : Agrarian Reform National Program (PPAH) is a program in providing the land for poor people. Classical problems that often arise in the implementation of land redistribution process especially concerning about recipients and the size of land itself. This issue getting sharpened when it was found that the redistribution process that is not built on a solid foundation leads to the limited PPAH impact on the welfare of the community. This situation is found when the target is not certain an ideal group that need land. Longo Caring is a village that received the widest land compared to 3 other villages in the Jasinga District. The result of PPAH showed that Jasinga has a new agrarian structure that is not ideal and leads to lead to a polarization of land ownership. Unified process that emerged in PPAH implementation is a consequence of the absence of interaction among community members and local participation.

Keywords : PPAH, land redistribution, the polarization of land ownership, local participation

Elliana Sidiparwaty (Research and Development Center, National Land Agency Republic of Indonesia, Jakarta)
SURVEYOR CRISIS IN THE ACCELERATION OF LAND REGISTRATION

Journal Pertanahan, Volume 4, No. 1, May 2014, Page : 79 - 102

ABSTRACT

Land registration is government's responsibility to ensure legal certainty of land rights. Land registration process requires surveyors to carry out the measurement of land parcels. Surveyors in land office complex are generally only two to three surveyors, therefore, Land Office needs additional three surveyors. Addition of surveyors do not happen in every year even if there is addition of land acquisition for only one surveyor. Lack of surveyor causing workload becomes larger so that the measurement of parcels to be blocked. On the other hand, measurement infrastructure availability is limited and partly less demand condition make less support for measurement activities. Land office has sought to overcome the limitations of surveyor with a variety strategies in order to land measurements can still be completed. However the addition of surveyor up to an adequate amount as needed is a must so that the acceleration of land registration can be achieved.

Keywords : land registration, surveyor, acceleration of land registration

Waskito (Center For Education and Training National Land Agency of the Republic of Indonesia, Jakarta)
ROLE OF THE HEAD OF THE VILLAGE / LURAH OF LAND CERTIFICATE

Journal Pertanahan, Volume 4, No. 1, May 2014, Page : 103 - 120

ABSTRACT

Kepala Desa/Lurah has roles in registration of land for people in rural/village which they lead. The roles are 1) to remind the public to put up boundary markers of their lands, 2) to attend the measurement process, 3) to remind the public to maintain the security of the basic framework of the national cadastrol (Kerangka Dasar Kadastrol Nasional), 4) Kepala Desa/Lurah as a member of the examination committee of land (Panitia A) and also in announcement of the parcels and objections. However, many Kepala Desa/Lurah do not know their role in land registration so that the necessary efforts should be taken to inform them.

Keywords : Kepala Desa/Lurah, Role in land registration

